

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2005, *Analisis Kebijaksanaan, Edisi Kedua: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bahri, T. Saiful, Hessel Nogi S. Tangkilisan dan Mira Subandini, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.
- Black's Medical Dictionary, 2005, *Black's Medical Dictionary 41st Edition Edited by Harvey Marcovitch*, A & C Black Publishers Limited, London.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah: M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- H.S., Salim dan Erlies S. Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , Sudikno, 2011, *Kapita Selekta Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang.
- Mukti, Ali Ghufro dan Moertjahjo, 2010, *Sistem Jaminan Kesehatan: Konsep Desentralisasi Terintegrasi*, PT. Karya Husada Mukti (KHM), Yogyakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Samba, GDE., 2007, *Fisioterapi Konseptual: Sebuah Pengantar*, Lembaga Studi Ilmu Fisioterapi (LSIF) Yayasan Fisioterapi Bandung, Bandung.
- Siswati, S., 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subarsono, A.G., 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah-Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Trisnantoro, Laksono, 2005, *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

-----, 2018, *Kebijakan Pembiayaan Dan Fragmentasi Sistem Kesehatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Triwibowo, Cecep, 2012, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit: Sebuah Kajian Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, MedPress, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat ditetapkan di Jakarta pada 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disahkan dan diundangkan pada 13 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, disahkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit, ditetapkan pada 15 April 2008.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis, ditetapkan pada 10

Desember 2013 dan diundangkan pada 24 Desember 2013 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, ditetapkan pada 29 September 2015 dan diundangkan pada 5 November 2015 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1662.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan dalam Penyelenggaraan JKN, ditetapkan pada 18 Oktober 2016 dan diundangkan pada 26 Oktober 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon, diundangkan pada 15 Juli 2009 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Seri D.1.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Bidang Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, diundangkan pada tanggal 27 November 2012 dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 50 Seri D.2.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon, diundangkan pada tanggal 5 Januari 2017 dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E.1.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Rumah Sakit Daerah Waled Kabupaten Cirebon, diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018 dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 102 Seri E.79

Jurnal dan Hasil Penelitian

Bury, Tracy J. dan Emma K. Stokes, "A Global View of Direct Access and Patient Self-Referral to Physical Therapy: Implications for the Profession", *Physical Therapy Journals APTA (American Physical Therapy Association)*, Volume 93 Number 4, pages 449-459, April 2013.

Kuswardani, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota Semarang", *Tesis*, Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 2016.

Mc Callum, Christine A. dan Tom DiAngelis, "Direct Access: Factors That Affect Physical Therapist Practice in the State of Ohio", *Physical Therapy Journals APTA (American Physical Therapy Association)*, Volume 92 Number 5, May 2012.

Pendergast, J., Stephanie A. Kliethermes, Janet K. Freburger dan Pamela A. Duffy, "A Comparison of Health Care Use for Physician-Referred and Self-Referred Episodes of Outpatient Physical Therapy", *Health Services Research (HSR/ Health Research and Educational Trust)*, Volume 47 Number 2 pages 633-654, April 2012.

Soekanto, Soerjono, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) Universitas Indonesia*, Volume 7 Nomor 6 Tahun 1977.

Yunitasari, R., "Pelayanan Fisioterapi Pada Era JKN Di RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten", *Tesis*, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Kebijakan Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2018.

Sumber Internet

Adisty, Rerre, 2018, "Gesekan BPJS Kesehatan dan Ikatan Fisioterapi Indonesia Berlangsung Sejak 2014", <https://www.ifi.or.id/2018/07/gesekan-bpjs-kesehatan-dan-ikatan.html>, diakses pada tanggal 08 Februari 2018.

Elisa, Fanny, 2018, "Aturan Baru Bpjs Kesehatan Menuai Kontroversi", <https://www.jpnn.com/news/aturan-baru-bpjs-kesehatan-menuai-kontroversi?page=4>, diakses tanggal 20 Maret 2019.

Ismawardani, Diah, Elsa Novelia, Chandra Nurcahyo, Yuliasman, Juliana Ramdhani, Budi Setiawan, Dwi Surini dan Tati Haryati Denawati, "Perubahan tarif INA-CBGs: Membuat Biaya Kesehatan Lebih Efektif", *Info BPJS Kesehatan*, Edisi VIII Tahun 2014, <https://bpjs-kesehatan.go.id>, diunduh tanggal 20 Maret 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

-----, <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

-----, <https://kbbi.web.id/publik>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

-----, <https://kbbi.web.id/transmisi>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/fragmentasi>, diakses pada tanggal 19 September 2019.

Novelia, Elsa, *et.al.*, “Begini Prosedur pelayanan Rehabilitasi Medik yang Dijamin BPJS Kesehatan” *Info BPJS Kesehatan: 73 Tahun Indonesia Merdeka-Akses Pembiayaan Ratusan Juta Masyarakat Terpenuhi Melalui Program JKN-KIS*, Buletin, Edisi 65 Tahun 2018, diunduh melalui <https://bpjs-kesehatan.go.id> diunduh tanggal 8 September 2019.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, Nomor 60P/HUM/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 melalui <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Ridarineni, Reni, 2018, “Mulai Hari Ini, Fisioterapis tak Layani Pasien BPJS”, <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/18/07/26/pcgo4w399-mulai-hari-ini-fisioterapis-tak-layani-pasien-bpjs>, diakses tanggal 08 Februari 2019.

Safutra, Ilham, 2018, “Akhirnya MA Batalkan Aturan Baru BPJS Kesehatan”, <https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/24/10/2018/akhirnya-ma-batalkan-aturan-baru-bpjs-kesehatan>, diakses pada tanggal 08 Februari 2019.

Salbiah, Nurul Adriyana, 2018, “Buntut Aturan Baru BPJS Membatasi Layanan Fisioterapi di RS”, <https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/30/07/2018/buntut-aturan-baru-bpjs-membatasi-layanan-fisioterapi-di-rs>, diakses tanggal 08 Februari 2019.

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), 2017, “WCPT Glossary: Terms used in WCPT’s policies and resources”, WCPT, London, page 38 of 52, <https://www.wcpt.org>, diunduh tanggal 15 Mei 2019.